

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEMPERKUAT
INDEPENDENSI PENGAWASAN PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA**

TESIS

**Oleh:
ASEP SUTARMIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEMPERKUAT
INDEPENDENSI PENGAWASAN PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Asep Sutarmin
240211040125**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sutarmin, S.Ag

Nim : 240211040125

Tempat/ Tgl. Lahir : Garut, 25 Januari 1977

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Memperkuat Independensi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2026

Yang membuat pernyataan,



Asep Sutarmin, S.Ag
NIM. 240211040125

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
No: 1537/Un.14/IV/UPM-BP/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Asep Sutarmin
NIM : 240211040125
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Memperkuat Independensi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 8 Mei 2026

Mengetahui,
Wakil Direktur


Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DALAM MEMPERKUAT INDEPENDENSI
PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Yang disusun dan diajukan oleh:

ASEP SUTARMIN

240211040125

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk dapat diajukan kepada Dosen Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA

Pembimbing II



Dr. Mahmud Yusuf, M.SI

PENGESAHAN TESIS

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DALAM MEMPERKUAT INDEPENDENSI
PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Yang disusun dan diajukan oleh:

ASEP SUTARMIN

240211040125

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji

Pada: Hari Senin Tanggal 25 Mei 2026

Dewan Penguji

Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1. Mujiburohman, M.A., Ph.D	Ketua	
2. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari, AZ, MA	Anggota	
3. Dr. Haris Faulidi A. Lc., M.Si	Anggota	
4. Dr. M. Syarif Hidayatullah, SE., MH	Sekretaris/Anggota	

Mengetahui,

Direktur



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Asep Sutarmin, NIM 240211040125 *Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Memperkuat Independensi Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA dan bimbingan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Kelembagaan, Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Independensi Pengawasan Syariah, Semi Independen Terintegrasi.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penguatan kerangka hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam berbagai regulasi yang secara normatif menempatkan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun demikian, dalam praktiknya, independensi DPS masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menunjukkan adanya relasi kepentingan yang tidak sepenuhnya netral, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas dan efektivitas pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dengan realitas implementatif dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif guna menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan dan kewenangan DPS secara normatif telah memiliki legitimasi hukum yang kuat serta fungsi strategis dalam menjamin kepatuhan syariah, namun secara konseptual kewenangannya masih bersifat mandat dan belum sepenuhnya berbentuk kewenangan atribusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat; kedua, independensi DPS belum terwujud secara optimal akibat adanya ketergantungan struktural dalam mekanisme pengangkatan dan sistem remunerasi yang bersumber dari LKS, yang mencerminkan relasi kepentingan yang tidak sepenuhnya netral serta mendorong kecenderungan praktik *symbolic compliance*; ketiga, diperlukan rekonstruksi kedudukan dan kewenangan DPS melalui penerapan model *semi-independen terintegrasi*, yaitu dengan tetap menempatkan DPS pada level operasional LKS, namun mengintegrasikannya secara vertikal dengan otoritas regulator dan otoritas syariah nasional, disertai penegasan kewenangan atribusi, penguatan fungsi audit syariah yang bersifat mengikat, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan independensi DPS tidak cukup dilakukan melalui pembaruan norma semata, melainkan memerlukan rekonstruksi desain kelembagaan secara komprehensif.

Model *semi-independen terintegrasi* yang ditawarkan dalam penelitian ini menjadi kontribusi konseptual utama dalam pengembangan sistem pengawasan syariah yang lebih independen, objektif, akuntabel, dan memiliki daya paksa hukum yang efektif dalam kerangka sistem keuangan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Asep Sutarmin, Student ID 240211040125, Reconstruction of the Position and Authority of the Sharia Supervisory Board in Strengthening the Independence of Supervision in Islamic Financial Institutions in Indonesia. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Graduate School of UIN Antasari Banjarmasin, under the supervision of I: Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, MA and II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.

Keywords: Institutional Reconstruction, Authority of the Sharia Supervisory Board (DPS), Independence of Sharia Supervision, Integrated Semi-Independent Model.

This research is motivated by the strengthening of the legal framework of the Sharia Supervisory Board (DPS) in various regulations that normatively position the DPS as the supervisor of sharia compliance in Islamic Financial Institutions (LKS). However, in practice, the independence of the DPS still faces various structural obstacles that indicate the existence of interest-based relationships that are not entirely neutral, potentially affecting the objectivity and effectiveness of supervision. This condition indicates a discrepancy between the normative construction and the practical implementation of the sharia supervisory system in Indonesia.

This study is a normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials, consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources, were analyzed qualitatively through deductive reasoning methods to produce prescriptive legal arguments.

The results of the study show that: first, the position and authority of the DPS normatively possess strong legal legitimacy and a strategic function in ensuring sharia compliance; however, conceptually, its authority remains delegated in nature and has not yet fully taken the form of attributed authority with binding legal force. Second, the independence of the DPS has not been optimally realized due to structural dependence in appointment mechanisms and remuneration systems funded by Islamic Financial Institutions, reflecting interest-based relationships that are not entirely neutral and encouraging tendencies toward symbolic compliance practices. Third, it is necessary to reconstruct the position and authority of the DPS through the implementation of an integrated semi-independent model, namely by maintaining the DPS at the operational level of Islamic Financial Institutions while integrating it vertically with regulatory authorities and national sharia authorities, accompanied by the affirmation of attributed authority, the strengthening of binding sharia audit functions, and the development of an integrated supervisory system.

Therefore, this study emphasizes that strengthening the independence of the DPS cannot be achieved merely through normative reform but requires a comprehensive reconstruction of institutional design. The integrated semi-

independent model proposed in this research constitutes the primary conceptual contribution to the development of a sharia supervisory system that is more independent, objective, accountable, and equipped with effective legal enforceability within the framework of Indonesia's Islamic financial system.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمٍ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ الْقِيَامَةَ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ خِيئِهِ.

“Barangsiapa yang melampangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melampangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. (H.R. Muslim 2699)

لِنَّاسٍ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ أَحَبُّ أ

“Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan dengan segenap jiwa dan raga, terkhusus untuk Almarhumah Ibunda tercinta sosok yang sejak dalam kandungan hingga hembusan napas terakhirnya tak pernah berhenti menyalakan doa, menanamkan optimisme, dan mengajarkan arti keteguhan hidup. Engkau adalah cahaya yang tak pernah padam dalam langkahku.

Untuk Ayahanda yang senantiasa menegakkan doa di setiap sujudnya, yang tak pernah lelah menuntun dengan ketegasan sikap dan ketulusan hati. Engkau adalah tiang kokoh yang menjaga arah perjalanan hidupku.

Untuk istri dan anak-anak tercinta, pelita yang menghangatkan jiwa dan sumber inspirasi yang tak tergantikan Karya ini bukan sekadar lembaran akademik, melainkan obor semangat yang kupersembahkan bagi anak-anak tercinta agar menjadi sumber inspirasi, teladan perjuangan, dan motivasi untuk menatap masa depan dengan keberanian, optimisme, dan keyakinan yang tak tergoyahkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Berkat limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya, penulis mampu menuntaskan karya ilmiah berupa tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan hati penuh syukur dan haru, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak berdiri sendiri. Setiap proses terjalin dari doa, dukungan, serta ketulusan banyak pihak di tengah keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari, AZ, M.A. dan Dr. Mahmud Yusuf, M.Si selaku pembimbing tesis, sosok yang dengan kesabaran, ketulusan, serta keluasan ilmu telah menuntun arah hingga karya ini terselesaikan.
2. Istri tercinta, Hj. Rinawati, S.Pd., sumber kekuatan dan keteguhan, yang dengan penuh keikhlasan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta materi, sekaligus menjadi penyejuk di setiap langkah perjuangan.
3. Ayahanda tercinta, Bapak Asum, yang senantiasa menghadirkan doa tanpa henti, menjadi sandaran batin dan penguat langkah dalam menempuh perjalanan ini.
4. Bapak Dr. Zainal, yang telah memberikan kesempatan berharga untuk mengikuti seminar proposal, sebuah pintu awal yang membuka jalan proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ilham Akbar dan Dr. M. Syarif Hidayatullah, sahabat diskusi, yang menghadirkan gagasan, masukan, serta semangat dalam setiap tahap penyusunan.
6. Para guru besar dan dosen, penabur ilmu dan inspirasi, khususnya Prof. Dr. H. Jalaludin, Prof. Dr. Fauzi Aseri, Prof. Dr. Ahmadi Hasan, Prof. Dr. Hanafiah, Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, Prof. Dr. Sukarni, Dr. Hj. Mariani, Dr. Zulpa Makiah, Dr. Amelia Rahmania, Dr. Fatrawati, Dr. Irfan Noor, Dr. Budi Rahmat Hakim, Dr. Zaki Mubarak, Dr. Mujiburrahman Abbas, Ph.D, (Kaprodi HES), Dr. Nispan Rahmi, Dr. Ahmad Muhajir, serta Dr. H. Anwar Hafidzi, yang memperkaya cakrawala keilmuan penulis.
7. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi yang telah banyak membantu, khususnya dalam proses pemberkasan dan administrasi hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sahabat-sahabat tercinta yang menjadi support system, para karyawan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kebersamaan selama proses ini berlangsung.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua, serta menjadikan setiap kebaikan yang telah diberikan bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Pada akhirnya, dengan mengharap ridha dan kasih sayang-Nya, penulis memanjatkan doa semoga karya ini membawa manfaat sebagai shadaqoh jariyah dan menjadi amal ibadah yang bernilai di hadapan-Nya. AmiinYaa Rabbal ‘alamin.

Banjarmasin, 28 Mei 2026

Penulis,

Asep Sutarmin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : 'Ain
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

- | | | | |
|--------------------|---|-------|--------------|
| 1. Fathah panjang | : | Â / â | 4. أو . : Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Î / î | 5. أي . : Ay |
| 3. Dhammah panjang | : | Û / û | |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al- qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al- kâfirûn*.
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakat al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nisâ'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya,
Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kerangka Teori.....	27
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	35
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN INDEPENDENSI KELEMBAGAAN	37
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan Syariah	37
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	37
2. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	39
3. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	42
4. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah	44
5. Sistem Pengawasan dalam Lembaga Keuangan Syariah	45
B. Tinjauan Umum tentang Dewan Pengawas Syariah.....	47
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	47
2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah	48
3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	50
4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Lembaga Keuangan Syariah.....	51
5. Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah.....	52
6. Hubungan Dewan Pengawas Syariah	53
C. Pengawasan Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah	55
1. Konsep <i>Wilāyah al-hisbah</i> (Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam).....	55
2. Sistem Pengawasan Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	57

3. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah	58
4. Mekanisme Pengawasan Produk dan Operasional LKS	59
5. Hubungan Pengawasan Syariah dengan Kepatuhan Syariah	60
D. Konsep Independensi dalam Lembaga Keuangan	62
1. Pengertian Independensi	62
2. Independensi dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	63
3. Independensi dalam Pengawasan Lembaga Keuangan	65
4. Independensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	66
5. Pentingnya Independensi dalam Pengawasan Syariah	67
E. Landasan Teoretis Kedudukan Dewan Pengawas Syariah	68
1. Teori Kedudukan	69
2. Teori Kewenangan	71
3. Teori Pengawasan	72
4. Teori Independensi Kelembagaan	73
5. Teori Good Corporate Governance	74
6. Teori Rekonstruksi Hukum	75

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia ..	77
1. Fondasi Normatif DPS dalam UU Perbankan Syariah 2008	77
2. Transformasi Regulasi DPS dalam UU PPSK 2023	78
3. Pengaturan DPS dalam POJK Lintas Sektor LKS	80
4. Fatwa DSN-MUI sebagai Basis Normatif Pengawasan Syariah	81
5. Harmonisasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah dalam LKS	83
6. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	84
7. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Perspektif Hukum Administrasi	87
8. Perbandingan Pengaturan DPS dalam Perspektif Internasional	90
B. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Lembaga Keuangan Syariah	94
1. Struktur Kelembagaan LKS Multi-Sektor	94
2. Posisi DPS dalam Struktur LKS. (Analisis Komparatif)	98
3. Relasi DPS dengan Direksi dan Organ Pengawas	101
4. Relasi DPS dengan Regulator dan DSN-MUI	104
5. DPS dalam Kerangka <i>Sharia Governance</i>	108
6. Independensi dan Akuntabilitas DPS dalam Struktur LKS	111
7. Standarisasi dan Harmonisasi Kedudukan DPS Antar Sektor	115
C. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah	119
1. Pengawasan Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	119
2. Kewenangan DPS dalam Persetujuan Produk Syariah	123
3. Fungsi Nasihat dan Opini Syariah DPS	126
4. Pelaporan dan Audit Syariah oleh DPS	130

5. Implementasi Kewenangan DPS pada LKS di Indonesia.....	135
6. Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum DPS.....	139
7. Tantangan Implementasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah.....	142

BAB IV ANALISIS DAN REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN INDEPENDENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 146

A. Analisis Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Regulasi LKS.....	146
1. Analisis Yuridis Kedudukan DPS dalam Kerangka Regulasi LKS.....	146
2. Analisis Relasi DPS dengan Organ Manajemen dalam LKS	150
3. Analisis Relasi DPS dengan Regulator dan Otoritas Syariah.....	155
4. Analisis Kewenangan DPS dalam Pengawasan Syariah.....	159
5. Analisis Efektivitas dan Permasalahan Praktik DPS	166
B. Kendala Independensi DPS dalam Pengawasan LKS	172
1. Ketergantungan Struktural DPS terhadap LKS	172
2. Konflik Kepentingan dalam Peran DPS	178
3. Dualisme Peran: Advisory vs Supervisory	181
4. Fragmentasi Regulasi Antar Sektor	183
5. Keterbatasan Kapasitas dan Profesionalitas DPS	185
6. Dampak terhadap Kepatuhan Syariah.....	186
C. Rekonstruksi Kedudukan DPS dalam Menjamin Independensi LKS	188
1. Prinsip Dasar Rekonstruksi DPS.....	189
2. Rekonstruksi Kedudukan Kelembagaan DPS.....	195
3. Rekonstruksi Kewenangan DPS	200
4. Rekonstruksi Relasi DPS dengan OJK dan DSN-MUI	204
5. Harmonisasi Regulasi DPS Antar Sektor.....	205
6. Model Ideal Independensi DPS (Perbandingan Malaysia)	206

BAB V PENUTUP..... 216

A. Kesimpulan.....	216
B. Rekomendasi.....	217

DAFTAR PUSTAKA 219

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 226